ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Iin Hot Prinauli Purba, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: linpurba95@gmail.com

Zefri Wirathama Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: zefripasaribu16@gmail.com

Christian Putra Tarigan, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: chrstnputra@gmail.com

<https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dampak program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap anak didik pemasyarakatan. LPKA sebagai institusi negara memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pembinaan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif guna mendukung reintegrasi sosial bagi anak yang tersangkut permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan karakter deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program pembinaan, serta dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Dari hasil pengumpulan dan analisis data, diketahui bahwa bentuk program pembinaan di LPKA Kelas I Medan meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Ketiga bentuk tersebut memberikan dampak signifikan dalam perubahan perilaku anak, peningkatan kesadaran hukum, penguatan nilai moral, serta peningkatan keterampilan hidup. Dari segi yuridis, program pembinaan mencerminkan perlindungan aktif negara terhadap hak anak. Sementara itu, dari perspektif tujuan hukum, program ini mencerminkan pemenuhan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan LPKA Kelas I Medan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan keluarga, dan partisipasi masyarakat demi keberlanjutan hasil pembinaan.

Kata Kunci: Program Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms and impacts of the guidance programs implemented at the Special Child Development Institution (LPKA) Class I Medan on juvenile inmates. As a state institution, LPKA carries a significant responsibility in providing educational, corrective, and rehabilitative guidance to support the social reintegration of children in conflict with the law. The research method employed is empirical legal research with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies on the implementation of guidance programs, and analyzed using the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon and Gustav Radbruch's theory of the purposes of law. The findings indicate that the forms of guidance programs at LPKA Class I Medan include educational development, personality development, and independence training. These programs have a significant impact on behavioral change, increased legal awareness, strengthened moral values, and the improvement of life skills among the children. Juridically, these programs represent the state's active protection of children's rights. From the perspective of the purposes of law, the programs reflect the fulfillment of justice, legal certainty, and legal utility. Therefore, it can be concluded that the guidance programs implemented at LPKA Class I Medan have been quite effective, although improvements in human resource capacity, family

support, and community participation are still needed to ensure the sustainability of the rehabilitation outcomes.

Key Words: Rehabilitation Program, LPKA, Children

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.¹ Pembinaan Anak adalah serangkaian upaya yang disengaja dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi individu dewasa yang berkompeten dan memiliki kemauan untuk berkontribusi dalam mewujudkan serta menjaga tujuan pembangunan nasional. Upaya pembinaan anak secara menyeluruh mencakup perlindungan, pemberian kesempatan, arahan, dan dukungan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang produktif dan berkualitas tinggi.² Tingkat perlindungan terhadap anak mencerminkan derajat kemajuan budaya dan sosial dalam suatu masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengupayakan perlindungan terhadap anak yang sejalan dengan kapasitas masing-masing demi kepentingan nasional. Karena perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang memiliki implikasi hukum, maka diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaannya.³ Kepastian hukum perlu dijaga untuk berlangsungnya keberhasilan tindakan preventif dan kuratif bagi keselamatan anak untuk menangkal penyelewengan yang dapat mengakibatkan prestasi negatif yang tidak diharapkan dalam kegiatan perlindungan anak.⁴

Bukan hanya orangtua yang bertanggungjawab atas anak, tetapi lingkungan sosial dan negara memiliki kontribusi signifikan dalam pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan hak anak adalah parameter perkembangan sosial dan budaya suatu negara dan penting untuk kesejahteraan anak.⁵ Mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin keamanan anak serta pelaksanaan hak-hak dasarnya secara menyeluruh, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan, dan mencapai perkembangan optimal secara maksimal, serta berpartisipasi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap anak. Oleh karena itu negara harus ikut andil dalam melakukan proses pembinaan dalam rangka membentuk karakter anak terkhusus

¹ Silalahi, A., Marlina, and Eddy T. 2019. "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, No. 1, hal 35.

² Tampubolon, Eric Lambue, and Chalid Sahuri. 2017. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*. PhD diss., Riau University, hlm. 5.

³ Rizal, Said, Yusriando, dan Mahyaya. "Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 1 (2019), hal 3.

⁴ A. N. A. K., dan Aris Irawan. "Resosialisasi Narapidana Anak Berkaitan Dengan Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana." *Lembaga Pemasayarakatan*, hal. 8.

⁵ Purba, Jose Fernando Seven, dan T. Riza Zarzani. "Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasayarakatan Lubuk Pakam." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023), hal 44.

dengan anak yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan tindak pidana pada anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) adalah anak yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hak kebebasannya dicabut dan ia harus melalui tahapan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga terkait Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak).⁶ Namun demikian istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) sudah tidak digunakan lagi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Sebagai gantinya, digunakan istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan adalah sebuah lembaga pemasyarakatan yang memberikan pelayanan dan pembinaan khusus untuk anak yang menjadi subjek dalam perkara hukum. Pembinaan di LPKA bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektualitas, keterampilan, sikap, perilaku, dan kesehatan anak. LPKA Kelas I Medan adalah salah satu LPKA terbesar di Sumatera Utara yang berperan dalam mendidik dan membina anak sebagai upaya membentuk kepribadian yang utuh agar siap menghadapi masa depan secara mandiri dan bertanggung jawab. LPKA juga memiliki peran yang meliputi pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan narapidana anak.

LPKA Kelas I Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak terbesar di wilayah Sumatera Utara dengan jumlah anak binaan yang cukup tinggi dan keragaman latar belakang kasus. Lembaga ini menjalankan fungsi pembinaan melalui berbagai program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak binaannya. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku negatif, tetapi juga memberikan bekal yang memadai agar mereka mampu membangun kehidupan yang lebih positif setelah menyelesaikan masa binaan. Menariknya, LPKA Kelas I Medan juga dikenal aktif mengembangkan program pembinaan berbasis karakter dan keterampilan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program pembinaan di LPKA ini kerap menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya tenaga pembina yang terlatih dan berdedikasi. Partisipasi aktif dan kesadaran anak binaan terhadap pentingnya program pembinaan juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang implementasi program pembinaan di LPKA Kelas I Medan, termasuk unsur-unsur pembinaan, program unggulan, dan hambatan yang dihadapi, menjadi penting untuk menilai efektivitasnya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi potensi residivisme.⁷ Hal ini yang mengindikasikan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap program pembinaan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Kualitas program pembinaan yang ada harus dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan kualitasnya agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Ini termasuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan

⁶ Pasaribu, Merry Roseline, Winona Silvy Noviyanti S., dan Rachel Lasria Naibaho. "Implementation of the Right to Remission for Prisoners of Narcotics Abuse in Lapas 1 Medan." *Law Journal of Law, Politics and Humanities* 4, no. 4 (2023), hal 400.

⁷ Anggraini, Rini. "Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta Tahun 2020." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 9, no. 1 (2020), hal. 326.

kegiatan rekreatif. Peningkatan kompetensi petugas juga perlu diperhatikan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani anak yang menjadi subjek dalam perkara hukum. Ini meliputi pemahaman tentang psikologi anak, teknik komunikasi yang efektif, dan metode pembinaan yang humanis. LPKA juga perlu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga sosial, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan keluarga narapidana. Kerjasama ini dapat membantu dalam memberikan dukungan tambahan bagi anak-anak, mulai dari masa pembinaan hingga proses adaptasi kembali di tengah masyarakat.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program pembinaan dalam mengubah perilaku anak menjadi lebih positif, meningkatkan kesadaran hukum, mengembangkan keterampilan, dan mengurangi residivisme. Penelitian ini akan mengidentifikasi pola pembinaan yang diterapkan, mengukur efektivitasnya, serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan, baik dari karakteristik anak, kualitas program, lingkungan LPKA, maupun dukungan eksternal. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembinaan di LPKA Kelas 1 Medan, mencakup perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pembina, peningkatan fasilitas, dan peningkatan kerjasama dengan keluarga serta masyarakat, sehingga berkontribusi pada upaya rehabilitasi dan pembimbingan bagi anak yang tersangkut kasus hukum secara lebih efektif.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah saja bentuk program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan?
2. Bagaimana analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi serta menggambarkan berbagai jenis program pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.
2. Untuk menganalisis efektivitas program pembinaan dalam membentuk perkembangan anak didik pasyarakat di LPKA Kelas I Medan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai realitas sosial yang dapat dilihat dan dipelajari langsung dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari masyarakat. Penelitian empiris bertujuan guna memperoleh pemahaman mengenai bagaimana implementasi hukum positif yang berlaku dalam praktik, terutama terkait pelaksanaan program rehabilitasi dan edukasi anak di lingkungan LPKA (LPKA) Kelas I Medan. Pendekatan ini menekankan pada observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode utama untuk memperoleh data faktual yang bersumber dari pengalaman dan praktik lapangan. Oleh karena itu, hukum dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga dalam konteks perilaku sosial dan lembaga yang menjalankannya.

⁸ Andani, Rizki. *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melakukan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Lembaga Khusus Anak Kelas I-A Tanjung Gusta Medan)*. Skripsi, Universitas Medan Area, 2019, hlm. 10.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa itu hanya memberikan gambaran tentang keadaan atau perilaku objek tanpa tujuan untuk membuat kesimpulan yang umumnya tepat. Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kelas I Medan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fakta, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data berdasarkan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan tantangan program pembinaan tersebut.

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan petugas LPKA. Selain itu, observasi langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan di dalam LPKA juga dilakukan guna memperoleh data kontekstual yang akurat. Data yang diperoleh dari dokumen dan literatur pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku ilmiah, laporan institusi resmi, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Instrumen proses perolehan data dalam studi ini disesuaikan dengan jumlah serta karakteristik responden, dengan metode utama yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Responden dipilih berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan informasi yang relevan terhadap permasalahan pokok penelitian.

Setelah seluruh data baik yang dikumpulkan secara langsung maupun yang diambil dari sumber pendukung, berhasil dikumpulkan secara komprehensif, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data melalui proses klasifikasi berdasarkan jenis dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif oleh penulis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan membandingkannya terhadap teori-teori yang terdapat dalam literatur, ketentuan aturan hukum yang berlaku disertai perspektif para akademisi atau praktisi hukum yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian ini. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan fenomena khusus yang diamati dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Progam Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di LPKA Kelas I Medan, pembinaan terhadap Andikpas dilaksanakan melalui tiga bentuk utama yakni pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pembinaan pendidikan. Ketiganya merupakan sistem terpadu yang saling mendukung dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, berlandaskan pada prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 dan asas perlindungan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk perilaku positif, kesadaran hukum, serta memberikan bekal keterampilan dan pendidikan yang relevan. LPKA berperan bukan hanya sebagai tempat penahanan, tetapi sebagai lembaga pembinaan yang menerapkan pendekatan multidisipliner, melibatkan petugas pemasyarakatan, guru, psikolog, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat, serta menjalin dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial.

3.1.1 Pembinaan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan manusia dan bangsa. Pendidikan tidak sekadar dipandang sebagai sarana pencerdasan, melainkan hak

fundamental yang dijamin dalam UUD dan berlaku bagi seluruh warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pendidikan merupakan hak yang harus diterima oleh setiap warga negara, sementara negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan dan mendanai pendidikan dasar. Dengan demikian, tidak ada satu pun warga negara termasuk anak pelaku tindak pidana yang tengah menjalani proses pembinaan di bawah hukum yang boleh terpinggirkan dari hak memperoleh pendidikan yang layak.

Sejalan dengan mandat konstitusi tersebut, berdasarkan hasil wawancara LPKA Kelas I Medan telah menginisiasi penyelenggaraan pendidikan formal bagi Andikpas melalui pendirian Sekolah NKRI. Sekolah ini merupakan bentuk konkret dari implementasi kebijakan pemasyarakatan berbasis pendidikan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan akses pendidikan bagi anak-anak yang terpaksa mengalami putus sekolah akibat proses peradilan dan pemidanaan. Keberadaan sekolah ini menjadi bagian integral dari strategi pembinaan anak yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan perilaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak dasar anak, khususnya dalam bidang pendidikan.

Sekolah NKRI berfungsi sebagai jembatan agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan yang sempat terputus. Kurikulum yang diterapkan sama dengan sekolah reguler, dan diajarkan oleh guru profesional yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta perangkat penunjang pembelajaran lainnya. Anak-anak didorong untuk mengikuti ujian kesetaraan Paket A, B, dan C tergantung pada jenjang pendidikan terakhir mereka.

3.1.2 Pembinaan Kepribadian

Tujuan dari pembinaan kepribadian adalah untuk membentuk karakter dan sikap mental anak untuk menciptakan pribadi yang beretika, dapat dipercaya, dan mampu menjaga perilaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPKA, pembinaan kepribadian terdiri atas:

a. Pembinaan Kesadaran Agama

Setiap anak yang sedang menjalani pidana tetap memiliki hak konstitusional dan hak asasi guna menunaikan kewajiban spiritual sesuai ajaran agama yang dianut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 28E UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPKA Kelas I Medan melaksanakan pembinaan keagamaan secara terstruktur dan nondiskriminatif sebagai bagian dari pelaksanaan asas pengayoman dan penghormatan terhadap harkat serta martabat Andikpas.

Fasilitas ibadah disediakan sesuai kebutuhan agama masing-masing anak, seperti masjid, gereja, vihara, dan pura. Pembinaan keagamaan dijadikan program wajib harian, meliputi kegiatan spiritual seperti pengajian, misa, ceramah, dan bimbingan rohani, yang bertujuan membentuk kesadaran moral dan religiusitas sebagai bagian dari proses rehabilitasi psikososial anak.

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Agama, tokoh agama, dan organisasi keagamaan, guna memastikan kegiatan pembinaan berjalan secara profesional, kontekstual, serta sesuai kebutuhan spiritual anak. Dengan demikian, pembinaan keagamaan tidak hanya menjamin pemenuhan hak kebebasan beragama, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemulihan dan pembentukan kepribadian anak dalam kerangka pemasyarakatan yang humanis.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dalam upaya pembinaan kepribadian yang menyeluruh, LPKA Kelas I Medan menyelenggarakan kegiatan kepramukaan melalui Gugus Depan 14099 sebagai sarana pembentukan karakter, nasionalisme, dan kesadaran kebangsaan bagi Andikpas. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan non-akademik yang menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan semangat UUD NRI Tahun 1945.

Materi pelatihan meliputi baris-berbaris, upacara bendera, permainan edukatif, serta diskusi tentang sejarah bangsa dan ideologi negara. Tujuan utamanya adalah mengembalikan identitas nasional anak yang mungkin terkikis akibat keterlibatan dalam tindak pidana, serta menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan patriotisme.

Kegiatan ini memiliki fungsi strategis dalam kerangka rehabilitasi sosial, karena tidak hanya memulihkan kesadaran hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan semangat gotong royong sebagai bagian dari *civic responsibility*. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan ini sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan berbasis nilai kemanusiaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, Gerakan Pramuka berperan sebagai instrumen negara dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing dan bermartabat.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dalam sistem pamasarakatan yang humanis dan edukatif, penyuluhan hukum di LPKA Kelas I Medan merupakan bentuk pembinaan preventif dan korektif yang bertujuan membangun kesadaran hukum Andikpas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya *legal empowerment* agar anak memahami hukum tidak semata sebagai alat pembatas melainkan sebagai panduan hidup yang adil dan bermartabat.

Penyuluhan diselenggarakan secara rutin dan kontekstual dengan pendekatan partisipatif. Materi mencakup bahaya narkoba, kekerasan, isu kesehatan seperti HIV/AIDS, serta norma hukum pidana yang relevan dengan kehidupan anak. Penyampaian dilakukan secara interaktif agar mampu menggugah refleksi pribadi atas konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kolaborasi antar-lembaga seperti Kejaksaan, LBH, dan BNN, serta mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA. Melalui penyuluhan ini anak-anak dibentuk menjadi individu yang menyadari dan mengenali hak serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat negara. Dengan demikian, penyuluhan hukum di LPKA bukan hanya instrumen edukatif, tetapi juga medium transformasi karakter yang mendukung reintegrasi sosial anak agar kembali berperan di lingkungan sosial sebagai pribadi yang patuh terhadap aturan hukum dan memiliki tanggung jawab sosial.

3.1.1 Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian bertujuan utama untuk menyiapkan anak didik agar dapat menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Prinsip pembinaan ini selaras dengan asas reintegrasi sosial dalam UU Pemasarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan anak dengan masyarakat melalui pemberian keterampilan hidup yang berguna dan realistis.

a. Bimbingan Bakat dan Minat Anak

Tahap awal dalam pembinaan kemandirian diawali dengan asesmen potensi individu setiap anak didik. Petugas pemasyarakatan melakukan penilaian terhadap bakat dan minat anak sejak awal masa pembinaan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta tes kemampuan dasar. Hasil asesmen ini menjadi landasan dalam penempatan anak pada program pelatihan yang paling sesuai dengan minat dan potensinya.

Sebagai contoh, anak dengan kecenderungan artistik seperti kemampuan menggambar akan diarahkan ke program desain grafis, mural, atau seni rupa lainnya. Selain itu, anak didik juga diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba keterampilan antar-LPKA, yang tidak hanya menjadi sarana aktualisasi diri tetapi juga membangun rasa percaya diri, daya saing positif, serta semangat kolaborasi antar-sesama anak didik.

b. Bimbingan Keterampilan Teknis

Pembinaan kemandirian berikutnya diwujudkan melalui pelatihan keterampilan teknis yang dirancang untuk menciptakan individu siap kerja. Berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan antara lain:

- 1) Pertukangan kayu dan pembuatan mebel yang dapat melatih keterampilan teknis, ketelitian, dan kreativitas.
- 2) Pertanian dan perkebunan untuk memperkenalkan anak pada prinsip-prinsip dasar agrikultur dan pengelolaan hasil alam.
- 3) Menjahit dan tata busana guna mengembangkan keterampilan dalam industri kreatif berbasis tekstil.
- 4) Dan lain-lain.

Seluruh pelatihan tersebut merupakan bagian dari sistem *intramural treatment* sebagaimana tercantum dalam PP No. 31 Tahun 1999 mengenai pembinaan serta pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan yang menekankan pentingnya kegiatan pembinaan dilakukan secara internal di dalam lembaga sebagai bentuk pemberdayaan dan pemulihan sosial.

Pelatihan ini tidak hanya memberi anak didik kemampuan teknis, melainkan juga menanamkan nilai-nilai etos kerja, ketekunan, tanggung jawab, disiplin, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dalam jangka panjang, pelatihan ini diharapkan menjadi modal utama bagi anak untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri setelah keluar dari lembaga.

c. Pendidikan Kewirausahaan melalui Kolaborasi dengan BLK

Komponen ketiga dari pembinaan kemandirian adalah pengembangan program kewirausahaan yang dilaksanakan melalui kerja sama antara LPKA dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan berbagai instansi pembina vokasi lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan dasar berwirausaha, sehingga anak didik memiliki alternatif jalur penghidupan mandiri setelah masa pidana berakhir.

Dalam program ini, anak-anak dibekali dengan pelatihan manajemen usaha kecil, strategi pemasaran produk, serta literasi keuangan dasar. Dengan pendekatan tersebut, anak-anak tidak hanya diajarkan cara memproduksi barang atau jasa, tetapi juga bagaimana merancang usaha secara berkelanjutan, termasuk aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan bisnis skala mikro. Hal ini sangat relevan mengingat sebagian besar anak didik berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mendukung dan membutuhkan keterampilan konkret untuk bertahan hidup secara mandiri di tengah masyarakat.

3.2 Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Pelaksanaan program pembinaan di LPKA Kelas I Medan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan anak di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari prinsip hukum bahwa setiap warga negara, termasuk anak yang tengah ditangani oleh sistem peradilan pidana, tetap memiliki hak konstitusional yang melekat dan tidak dapat dicabut, khususnya hak atas pendidikan, pembinaan moral, serta pengembangan diri.⁹ Dalam hal ini, pembinaan di LPKA dapat dimaknai sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan perlindungan hukum secara aktif sebagaimana dijelaskan dalam Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon, yakni suatu upaya negara untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara melalui tindakan positif, termasuk dalam bentuk pelayanan pendidikan, keterampilan, dan pembinaan kepribadian.¹⁰

a. Pembinaan Kepribadian

Bentuk pembinaan kepribadian yang dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, kepramukaan, dan penyuluhan hukum, merupakan implementasi langsung dari asas penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti dari Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, pembinaan ini mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, sebab bertujuan untuk menanamkan kembali kesadaran etik dan spiritual anak terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sekaligus memfasilitasi perubahan sikap secara positif.¹¹

Sebagai contoh, kegiatan keagamaan bukan semata menjalankan kewajiban administratif negara, melainkan menjadi media penyembuhan psikologis anak. Penanaman nilai-nilai moral dan religius berperan penting sebagai mekanisme rekonstruksi identitas anak. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang menjadi dasar pendekatan pemidanaan terhadap anak sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 UU SPPA.¹² Hak untuk mendapatkan bimbingan keagamaan tidak terbatas sebagai aspek dari hak asasi manusia saja, tetapi juga merupakan hak hukum yang wajib difasilitasi oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dalam situasi rentan. Demikian pula, pelaksanaan kepramukaan dan penyuluhan hukum merupakan sarana edukatif yang memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial anak. Ini membuktikan bahwa pembinaan kepribadian di LPKA telah melampaui pendekatan retributif, dan lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan edukatif sebagaimana digariskan dalam paradigma hukum modern yang mengutamakan reintegrasi sosial.

b. Pembinaan Kemandirian

Program pembinaan kemandirian di LPKA Kelas I Medan juga dapat dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum dalam dimensi ekonomi dan sosial anak. Melalui pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan, negara tidak

⁹ Rizki, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Tawuran) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2023), hal 11992.

¹⁰ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

¹¹ Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (1946), dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

¹² Rizki Akbar. "Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2023), hal 84.

hanya memberikan pelayanan, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup anak setelah mereka menyelesaikan masa pidana.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya mencakup perlindungan terhadap tindakan negara yang merugikan hak warga negara, tetapi juga mengharuskan negara untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar hak tersebut dapat dinikmati secara nyata.¹³ Dalam konteks ini, pelatihan kemandirian di LPKA merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam memberikan jaminan perlindungan sosial dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan dalam hal ini anak didik masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori keadilan rehabilitatif yang menyatakan bahwa tujuan pidana terhadap anak bukanlah untuk membalas kesalahan, tetapi untuk memperbaiki dan memulihkan anak sebagai individu yang berdaya guna. Pelatihan keterampilan efeknya tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, tetapi juga menjadi simbol rekognisi negara terhadap potensi anak yang tidak boleh dihapus oleh kesalahan masa lalu.¹⁴

c. Pembinaan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan formal melalui Sekolah NKRI di LPKA Medan merupakan manifestasi konkret dari asas nondiskriminasi dalam hukum serta perwujudan dari Pasal 31 UUD NRI 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Berdasarkan pendekatan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, program ini mencerminkan keberimbangan antara tiga pilar utama esensi dari tujuan hukum mencakup unsur keadilan, kepastian dalam penerapan hukum, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dari segi keadilan, anak yang sedang menjalani pidana tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dalam hal hak pendidikan.¹⁵ Dari sisi kepastian hukum, LPKA telah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan mandat konstitusi dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun dari aspek kemanfaatan, pendidikan telah menjadi alat utama dalam rehabilitasi anak, membentuk kembali harapan, tujuan hidup, dan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat setelah bebas. Dalam analisis hukum lebih lanjut, pendidikan dalam sistem masyarakat anak bukanlah sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian esensial dari pembinaan masyarakat. Pendidikan memainkan peran sebagai sarana transformasi sosial (*transformative justice*), di mana anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana tidak lagi diperlakukan sebagai residivis potensial, tetapi sebagai aset bangsa yang tengah dipulihkan martabat dan potensinya.

Secara teoretis, pelaksanaan ketiga bentuk pembinaan tersebut menegaskan bahwa negara hadir sebagai subjek hukum yang aktif dan progresif. Dalam paradigma negara hukum yang demokratis, negara memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjamin hak formal warga negaranya, tetapi juga mengupayakan terpenuhinya hak tersebut melalui kebijakan dan program nyata. Dalam hal ini, LPKA Kelas I Medan telah menjadi cermin pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dan *rule of law*, sebagaimana

¹³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal 28

¹⁴ Heriyanti, dkk. "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di SD Kota Medan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023), hal 300.

¹⁵ Zulkifli, Suhaila. "Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 1, no. 2 (2022), hal 7.

diharapkan dalam pembentukan tata kelola hukum pidana anak yang adil dan proporsional.

Dengan mengadopsi pendekatan multidisipliner, melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, BLK, BNN, hingga tokoh masyarakat dan keluarga, LPKA telah menjalankan prinsip *partisipatif* dalam hukum perlindungan anak. Pendekatan ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi substansial dan kontekstual, yang menunjukkan bahwa hukum telah berfungsi secara sosial untuk mengangkat harkat manusia, bahkan dalam kondisi pemidanaan sekalipun.

4. KESIMPULAN

Program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan mencakup tiga kategori utama, yaitu pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Ketiga bentuk pembinaan ini dilakukan secara terintegrasi guna mendukung proses pemulihan pribadi dan adaptasi sosial anak didik di lembaga pasyarakatan. Pembinaan pendidikan difokuskan melalui penyelenggaraan kegiatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan akademik. Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk karakter yang positif dan bertanggung jawab, sementara pembinaan kemandirian memberikan keterampilan hidup yang bermanfaat bagi masa depan anak didik. Program pembinaan ini memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku dan kesiapan sosial anak, menjadikan pendidikan sebagai media transformasi sosial, kepribadian sebagai fondasi moral, dan kemandirian sebagai bekal praktis. Secara yuridis, program ini mencerminkan perlindungan aktif dari negara serta pemenuhan terhadap prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, efektivitas program pembinaan di LPKA Kelas I Medan dinilai cukup baik dalam aspek hukum, sosial, maupun kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Dikutip dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Artikel Jurnal, Skripsi, dan Disertasi

- Andani, Rizki. "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan)." PhD diss., Universitas Medan Area, 2019.
- Irawan, Aris. "Resosialisasi narapidana anak berkaitan dengan efektivitas pola pembinaan narapidana di Lembaga Pasyarakatan Anak: Studi kasus Lembaga Pasyarakatan Anak Kelas II-B Tanjung Pati Sumatera Barat). Padang: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas." *Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia* (2011).
- Maisun, Syafira Salsabillah Inas. "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 9, no. 1 (2020): 93-101.

- Pasaribu, Merry Roseline, and Rachel Lasria Naibaho. "Implementation of the Right to Remission for Prisoners of Narcotics Abuse in Lapas 1 Medan." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 400-405.
- Purba, Boy Yosua. "Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt. P/2019/Pn. Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 14-27.
- Purba, Jose Fernando Seven, and T. Riza Zarzani. "Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 42-56.
- Rizal, Said, Yusriando Yusriando, and Mahyaya Mahyaya. "Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Tingkat Pengadilan Tinggi Di Pengadilan Tinggi Banda Aceh." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 1 (2020).
- Rizki, Rizki Akbar. "Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)." *Dinamika* 26, no. 17 (2021): 2060-2079.
- Rizki, Rizki, Advantage Timothy Divana Matondang, Fernandes Gilbert Hutahean, and Sigar P. Berutu. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11992-12001.
- Silalahi, Andre, Marlina Marlina, Triono Eddy, and Aulia Rosa Nasution. "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 98-108.
- Sormin, Gracesela Sondang, Kartina Pakpahan, Lilis Suriani Pane, and Dela Septiana Pinayungan. "Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di sd kota medan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 300-307.
- Tampubolon, Eric Lambue, dan Chalid Sahuri. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*. Disertasi Doktor, Riau University. 2017.
- Zulkifli, Suhaila, Yanti Agustina, Atika Sunarto, Iin Hotprinauli Purba, and Muhammad Ali Adnan. "Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 1, no. 2 (2022): 7-13.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak